

ANALISIS KAUSALITAS HARGA BERAS, HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP) DAN INFLASI SERTA EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HPP DI INDONESIA

(Causality Analysis of Rice Price, the Government Purchase Price (HPP) and Inflation as Well as the Effectiveness of HPP Policy in Indonesia)

Andi Saputra, Bustanul Arifin, Eka Kasymir

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145, Telp. 081996970190, e-mail: andy.lambang@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the causal relationship between the retail price of rice (HEB) the government purchase price (HPP) and inflation in Indonesia. The data analysis used in this research is analysis of causality by using the Engel Granger causality analysis and analysis price transmission elasticity. The results showed that there was one-way causality relationship between inflation and HEB. The HEB was at $\alpha=5\%$ and the causality relationship between inflation and HPP were one-way. Inflation affected HPP on both dry grain harvest (HGKP) and milled rice (HGKG) respectively - each at $\alpha=1\%$. There was one-way causal relationship between the retail price of rice and HPP. The HEB influenced HPP on both HGKP and HGKG at $\alpha=1\%$ and $\alpha=5\%$. The HPP policy had not been effectively done by price transmission elasticity between HEB, HGKP and HGKG which was equal to 0.9 ($Et < 1$). It meant that changes in the level of consumer prices that occurred was not responded by the producer price level.

Keywords: causality, HEB, HPP, HGKG, HGKP

PENDAHULUAN

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. Perkembangannya yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Banyak kajian membahas inflasi, tidak hanya cakupan regional, nasional, namun juga internasional. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia yang memiliki struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian (Nugroho dan Basuki, 2012).

Sebagai indikator ekonomi makro, laju inflasi tidak hanya akan berpengaruh terhadap kinerja pasar barang, tetapi juga akan berpengaruh langsung terhadap pasar uang dan pasar modal. Dinamika pasar barang merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan laju inflasi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pasar produk makanan (pangan) merupakan salah satu pasar barang yang memegang peran kunci dalam penentuan laju inflasi. Komoditas pangan yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap laju

inflasi di Indonesia adalah beras. Perkembangan kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan perkembangan kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional tahun 2006-2011 yang disajikan pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional mengalami fluktuasi. Kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional tertinggi terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan kenaikan harga beras.

Harga beras pada tahun 2006 naik karena adanya pembatasan impor beras, kenaikan HPP beras, produksi beras yang relatif stagnan dan musim kemarau berkepanjangan juga memicu kenaikan harga beras. Tahun 2007 kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional mengalami penurunan, karena terjaganya pasokan dan distribusi beras.

Tabel 1. Perkembangan kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional tahun 2006-2011

Tahun	Kontribusi beras (%)	Inflasi (%)
2006	1,63	17,11
2007	0,18	6,60
2008	0,05	6,59
2009	0,14	11,06
2010	0,23	2,78
2011	0,13	6,96

Sumber : BPS, 2012

Produksi beras yang membaik pada tahun 2008 dan 2009, serta tekad dan keputusan kebijakan untuk tidak melakukan impor beras ketika harga pangan global melonjak liar, ternyata mampu mengurangi kontribusi kenaikan harga beras terhadap laju inflasi. Tahun 2010, kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional mengalami peningkatan kembali sebesar 0,09% dari tahun 2009. Kenaikan kontribusi ini diakibatkan instabilitas harga pangan yang terjadi. Instabilitas harga pangan yang terjadi dikarenakan musim basah yang terlalu panjang dan mempengaruhi pola distribusi bahan pangan. Tahun 2011, kontribusi beras terhadap laju inflasi nasional mengalami penurunan, ini dikarenakan harga beras yang mulai sedikit mengalami kestabilan.

Di Indonesia, beras memberikan peran hingga sekitar 45 persen dari total konsumsi makanan, atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Hal tersebut relatif merata di seluruh Indonesia, maksudnya secara gizi, ekonomi, sosial dan budaya, beras tetap merupakan pangan terpenting bagi sebagian besar masyarakat (Arifin 2003). Selain itu, dalam komponen pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia, beras mempunyai bobot yang paling tinggi.

Dengan demikian, dalam mengendalikan laju inflasi di Indonesia, salah satu aspek yang patut mendapat perhatian yaitu pengendalian terhadap harga kelompok pangan terutama beras. Peran kelompok pangan terhadap laju inflasi diperkirakan akan masih dominan, paling tidak untuk 5–10 tahun mendatang. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kestabilan harga beras agar tidak mempengaruhi laju inflasi.

Kebijakan harga yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga beras adalah berupa kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Namun, adanya kebijakan HPP justru membuat harga beras di pasaran meningkat. Adanya kenaikan HPP membuat petani secara psikologis berharap menjual gabah atau beras dengan harga lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pedagang membayar lebih mahal gabah atau beras tersebut sehingga harga jual beras di pasar meningkat (Kompas, 2011). Harga beras yang terjadi dan terus meningkat akan memberikan kontribusi dalam laju inflasi nasional (Setneg, 2011).

Selain itu, kebijakan HPP yang ditetapkan pemerintah secara tidak langsung akan

mempengaruhi laju inflasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Bank Indonesia yang menghitung dampak dari kenaikan kebijakan harga terhadap inflasi. Hasil yang didapat adalah jika tarif dasar listrik (TDL) dinaikkan 10 persen maka akan memberi tambahan inflasi sebesar 0,2 persen. Sementara jika harga pembelian pemerintah (HPP) dinaikkan 10 persen maka akan memberi tambahan inflasi sebesar 0,1 persen (Antara, 2012). Dengan demikian secara tidak langsung kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP), baik untuk gabah maupun beras terbukti dapat memicu inflasi. Pertimbangan inilah yang mendorong dilakukannya penelitian mengenai hubungan kausalitas antara inflasi, harga eceran beras dan harga pembelian pemerintah (HPP) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan kausalitas antara inflasi, harga eceran beras dan HPP di Indonesia, dan juga untuk mengetahui efektifitas kebijakan HPP yang dilakukan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian yaitu data harga eceran beras dan harga pembelian pemerintah (HPP) tahun 1986-2011 yang bersumber dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Pusat Jakarta, data inflasi nasional tahun 1986-2011 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Jakarta dan Bank Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kausalitas dengan menggunakan software *E-Views 5.1* dan analisis elastisitas transmisi harga. Analisis kausalitas digunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara inflasi, harga eceran beras dan HPP di Indonesia. Analisis elastisitas transmisi harga digunakan untuk mengetahui efektifitas kebijakan HPP yang dilakukan di Indonesia.

Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis kausalitas adalah melakukan uji stasioneritas dari masing-masing data. Uji stasioner data dilakukan untuk menghindari masalah regresi semu atau korelasi semu, sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih sah. Uji stasioner data dilakukan dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller (ADF) dan Phillips Perron (PP) (Juanda dan Junaidi, 2012).

Prosedur untuk mengetahui data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai

statistik ADF atau PP dengan nilai kritis distribusi Mac Kinnon. Nilai statistik ADF atau PP ditunjukkan oleh nilai t statistik. Jika nilai absolut statistik ADF atau PP lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai statistik ADF atau PP lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner. Model persamaan dari uji stasioner sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = a_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^z \beta_i \Delta Y_{t-1+i} + et \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan : Y = Variabel yang diamati
 $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$
 T = Waktu

Langkah kedua yang dilakukan adalah melakukan uji kointegrasi antar variabel. Uji kointegrasi digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel ekonomi atau variabel finansial memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Terkointegrasi atau tidak antar variabel, dapat dilihat dengan stasioner atau tidaknya data. Jika data tersebut stasioner maka antar variabel terkointegrasi. Model persamaan dari uji kointegrasi sebagai berikut:

$$I_t = \beta_0 + \beta_1 HBE_t + \beta_2 HPP_t + et \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan: I_t = Inflasi
 HBE_t = Harga beras
 HPP_t = Harga Pembelian Pemerintah

Langkah ketiga yang dilakukan adalah uji kausalitas. Hubungan kausalitas antar dua variabel atau lebih dapat dihitung dengan menggunakan uji F. Program *E-Views* memberikan informasi nilai F hitung dan probabilitasnya. Keputusan ada tidaknya kausalitas dengan uji F bisa dilihat dengan nilai probabilitasnya (Widarjono, 2007). Pada uji kausalitas Granger terdapat empat kemungkinan hasil yang dapat diperoleh, yaitu;

1. jika $a_j \neq 0$ dan $b_j = 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari inflasi ke harga beras dan harga pembelian pemerintah, dan dari harga beras ke harga pembelian pemerintah,
2. jika $a_j = 0$ dan $b_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari harga beras dan harga pembelian pemerintah ke inflasi, dan dari harga pembelian pemerintah ke harga beras,
3. jika $a_j = 0$ dan $b_j = 0$, maka tidak terdapat hubungan kausalitas antara harga beras, harga pembelian pemerintah dan inflasi,

4. jika $a_j \neq 0$ dan $b_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara harga beras, harga pembelian pemerintah dan inflasi.

Analisis elastisitas transmisi harga bertujuan untuk melihat bagaimana dampak perubahan harga suatu barang di tingkat pasar tertentu terhadap perubahan harga barang itu di tempat/tingkat pasar lainnya (Hasyim, 2012). Secara matematis, elastisitas transmisi harga dirumuskan sebagai berikut:

$$Et = \frac{\delta Pr / Pr}{\delta Pf / Pf} \quad \text{atau} \quad Et = \frac{\delta Pr}{\delta Pf} \cdot \frac{Pf}{Pr} \quad \dots (3)$$

Harga mempunyai hubungan yang linear, dimana Pf merupakan fungsi dari Pr. Oleh karena itu, secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$Pf = a + bPr \dots \dots \dots (4),$$

dan dari persamaan (4) diperoleh:

$$b = \frac{\delta Pf}{\delta Pr} \quad \text{atau} \quad \frac{\delta Pr}{\delta Pf} = \frac{1}{b} \quad \dots (5),$$

$$\text{maka } Et = \frac{1}{b} \cdot \frac{Pf}{Pr} \quad \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan: Et = Elastisitas transmisi harga
 δ = Diferensiasi atau turunan
 Pf = Harga rata-rata di tingkat petani (produsen)
 Pr = Harga rata-rata di tingkat konsumen
 a = Konstanta atau titik potong
 b = Koefisien regresi

Menurut Hasyim (2012), kriteria pengambilan keputusan pada elastisitas transmisi harga adalah:

- (a). jika $Et = 1$, berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen akhir sama dengan laju perubahan harga di tingkat produsen. Hal ini berarti bahwa pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku tataniaga adalah bersaing sempurna, dan sistem tataniaga yang terjadi sudah efisien,
- (b). jika $Et < 1$, maka laju perubahan harga di tingkat konsumen akhir lebih kecil daripada laju perubahan harga di tingkat produsen. Pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku pasar adalah pasar tidak bersaing sempurna dan sistem pemasaran yang berlaku belum efisien,
- (c). jika $Et > 1$, berarti laju perubahan harga di tingkat konsumen akhir lebih besar dibandingkan dengan laju perubahan harga di

tingkat produsen. Keadaan ini bermakna bahwa pemasaran yang berlaku belum efisien dan pasar yang dihadapi oleh pelaku tataniaga adalah bersaing secara tidak sempurna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kausalitas

Analisis kausalitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan kausalitas dua arah antara harga eceran beras (HEB), harga pembelian pemerintah baik gabah kering panen maupun gabah kering giling (HGKP dan HGKG) dan inflasi di Indonesia. Data yang digunakan untuk analisis ini adalah data inflasi, harga eceran beras (HEB) dan harga pembelian pemerintah baik untuk gabah kering panen maupun gabah kering giling (HGKP dan HGKG) disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan perkembangan data inflasi, harga eceran beras (HEB) dan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam kurun waktu 26 tahun yang disajikan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa perkembangan harga eceran beras (HEB) dan harga pembelian pemerintah (HPP) meningkat setiap tahunnya. Sementara laju inflasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Laju inflasi yang fluktuatif setiap tahunnya disebabkan oleh berbagai faktor selain beras. Tinggi rendahnya inflasi di Indonesia di sebabkan oleh kontribusi dari berbagai aspek, yaitu inflasi inti, inflasi *administered* dan inflasi *volatile food*. Beras merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi laju inflasi di Indonesia. Dalam laju inflasi umum, kelompok bahan pangan (*volatile food*) memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pengeluaran rumah tangga lainnya. Beras merupakan kelompok pangan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap laju inflasi *volatile food*.

1) Uji stasioneritas data

Uji stasioner dilakukan untuk menghindari masalah regresi semu atau korelasi semu, sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih sah. Uji stasioner data dilakukan dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller (ADF) dan Phillips Perron (PP). Prosedur untuk mengetahui data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF/PP dengan nilai kritis distribusi Mac Kinnon.

Nilai statistik ADF/PP ditunjukkan oleh nilai t statistik. Jika nilai absolut statistik ADF/PP lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai statistik ADF/PP lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner. Untuk mengatasi data yang tidak stasioner dapat dilakukan proses pembedaan atau diferensiasi (*differencing*) terhadap deret data asli (Juanda dan Junaidi, 2012). Hasil uji stasioner data inflasi, HEB dan HPP dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil uji stasioneritas diketahui bahwa data inflasi dan harga eceran beras (HEB) telah stasioner pada tingkat level, dengan nilai t-statistik ADF dan PP lebih besar dari nilai kritis Mc Kinnon pada berbagai tingkat alfa (α). Sementara data HGKP dan HGKG belum stasioner pada tingkat level dengan nilai t-statistik ADF dan PP lebih kecil dari nilai kritis Mc Kinnon pada berbagai tingkat alfa (α). Oleh karena itu, data HGKP dan HGKG perlu dilakukan proses diferensiasi (*differencing*). Setelah dilakukan proses diferensiasi, maka dapat dilihat bahwa data HGKP dan HGKG telah stasioner pada tingkat pertama dengan nilai t-statistik ADF dan PP lebih besar dari nilai kritis Mc Kinnon.

Tabel 2. Perkembangan inflasi, harga eceran beras (HEB) dan harga pembelian pemerintah (HPP) tahun 1986-2011

Tahun	Inflasi ¹	HEB ²	HPP ²	
			HGKP	HGKG
1986	8,83	343	105	175
1987	8,90	383	135	190
1988	5,47	465	135	210
1989	5,97	493	175	250
1990	9,53	518	190	270
1991	9,52	557	210	295
1992	4,94	603	235	330
1993	9,77	592	245	340
1994	9,24	660	260	360
1995	8,64	776	285	400
1996	6,47	880	330	450
1997	11,05	1.063	385	525
1998	77,63	2.099	440	800
1999	2,01	2.665	1.058	1.400
2000	9,35	2.424	1.058	1.400
2001	12,55	2.537	1.095	1.500
2002	10,03	2.826	1.095	1.519
2003	5,06	2.785	1.230	1.725
2004	6,40	2.850	1.230	1.725
2005	17,11	3.475	1.330	1.740
2006	6,60	4.462	1.730	2.250
2007	6,59	5.157	1.730	2.575
2008	11,06	5.484	2.200	2.800
2009	2,78	6.011	2.400	3.000
2010	6,96	7.097	2.640	3.300
2011	3,79	8.103	2.640	3.300

¹⁾ BPS (2012)

²⁾Bulog (2012)

Tabel 3. Hasil uji stasioner data inflasi, harga eceran beras (HEB) dan harga pembelian pemerintah (HPP)

Data	Nilai Kritis Mc Kinnon	t-stat. ADF	t stat. PP
Inflasi	Level	-5,225133	-5,225969
	1%	-3,724070	-3,724070
	5%	-2,986225	-2,986225
	10%	-2,632604	-2,632604
HEB	Level	0,561104	1,125576
	1%	-4,416345	-4,374307
	5%	-3,622033	-3,603202
	10%	-3,248592	-3,238054
HGKP	Level	-1,453792	-1,453792
	1%	-4,374307	-4,394309
	5%	-3,603202	-3,612199
	10%	-3,238054	-3,243079
HGKP	<i>First difference</i>	-5,934433	-5,936628
	1%	-4,374307	-4,394309
	5%	-3,603202	-3,612199
	10%	-3,238054	-3,243079
HGKG	Level	-1,605651	-1,631292
	1%	-4,374307	-4,394309
	5%	-3,603202	-3,612199
	10%	-3,238054	-3,243079
HGKG	<i>First difference</i>	-4,148950	-4,045743
	1%	-4,374307	-4,394309
	5%	-3,603202	-3,612199
	10%	-3,238054	-3,243079

Jika semua data telah stasioner, maka selanjutnya dilakukan uji kointegrasi antar variabel. Namun, jika data yang digunakan tetap tidak stasioner pada tingkat kedua (*second difference*), maka data tersebut tidak layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

2) Uji kointegrasi

Uji kointegrasi digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel ekonomi atau variabel finansial memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Guna melihat apakah antar variabel terkointegrasi atau tidak, dapat dilihat dengan stasioner atau tidaknya data. Jika data tersebut stasioner maka antar variabel terkointegrasi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, didapat hasil bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara inflasi, harga eceran beras dan harga pembelian pemerintah (HPP).

3) Uji kausalitas

Uji kausalitas pertama kali dikemukakan oleh Engel dan Granger. Tujuan kausalitas Granger adalah meneliti apakah A mendahului B, atukah B mendahului A, atukah hubungan antara A dan B timbal balik. Untuk melihat hubungan kausalitas antar dua variabel atau lebih adalah dengan menggunakan uji F. Program *E-views* memberikan informasi nilai F hitung dan probabilitasnya. Keputusan ada tidaknya kausalitas dengan uji F bisa dilihat dengan nilai probabilitasnya (Widarjono, 2007). Hasil uji kausalitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil uji kausalitas pada Tabel 4 diketahui bahwa terjadi hubungan kausalitas satu arah antara inflasi, harga eceran beras (HEB) dan HPP, yaitu inflasi mempengaruhi HEB pada α 5% sebesar 0,04735. Artinya, kenaikan 1% inflasi akan mempengaruhi harga eceran beras (HEB) sebesar 0,04735%. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Widiarsih (2012) yang menyimpulkan bahwa harga beras maupun harga dasar gabah berpengaruh signifikan terhadap inflasi bahan makanan di Indonesia.

Inflasi sendiri diartikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian suatu negara. Inflasi yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu inflasi inti, inflasi *administered* dan inflasi *volatile food*. Banyak komponen penyebab inflasi selain beras, yaitu diantaranya BBM, tarif dasar listrik, harga cabai dan lain-lain.

Inflasi yang terjadi karena komponen-komponen lain selain beras, misalnya harga BBM, menyebabkan terjadinya kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan harga yang terjadi menyebabkan biaya produksi dan pemasaran yang digunakan dalam usahatani meningkat. Meningkatnya biaya produksi dan pemasaran, memaksa petani untuk menjual berasnya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk menutupi biaya input yang tinggi.

Selain itu, tingginya biaya produksi menyebabkan usahatani padi tidak optimal, sehingga produksi yang dihasilkan menurun. Produksi atau penawaran yang menurun, sementara permintaan tetap tinggi akan menyebabkan *defisit supply*.

Tabel 4. Hasil uji kausalitas inflasi, harga eceran beras (HEB) dan harga pembelian pemerintah (HPP)

Hipotesis Nol	Obs. (th)	F-Stat.	Peluang
1. HEB mempengaruhi inflasi	24	0,35893	0,70306
2. Inflasi mempengaruhi HEB		3,59671	0,04735*
3. HGKP mempengaruhi inflasi	22	0,29482	0,87613
4. Inflasi mempengaruhi HGKP		6,82139	0,00347*
5. HGKG mempengaruhi inflasi	24	0,38810	0,68360
6. Inflasi mempengaruhi HGKG		10,1933	0,00098*
7. HGKP mempengaruhi HEB	24	3,00779	0,07331
8. HEB mempengaruhi HGKP		10,5213	0,00084*
9. HGKG mempengaruhi HEB	25	2,16307	0,15552
10. HEB mempengaruhi HGKG		4,43275	0,04690*

Keterangan : Obs. = Observasi (jumlah data yang diambil)

Kekurangan penawaran yang terjadi menyebabkan terjadinya permainan harga di pasar oleh pedagang, yaitu dengan menaikkan harga beras. Jika pemerintah tidak tanggap menangani masalah tersebut, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan, beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia dan sebagai indikator tingkat kemiskinan. Masyarakat yang berpendapatan tetap dan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan pokok (beras) dikarenakan harganya yang mahal.

Inflasi, harga beras, tingkat kesejahteraan petani dan tingkat kemiskinan mempunyai hubungan yang saling terkait, dapat diibaratkan seperti lingkaran setan. Artinya adalah satu aspek yang ditangani, maka akan berdampak kepada aspek lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang benar-benar mampu menjaga stabilitas harga pangan, agar masalah-masalah tersebut dapat teratasi dengan baik.

Inflasi mempengaruhi harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen dan gabah kering giling (HGKP dan HGKG) masing-masing sebesar 0,00084 dan 0,04690. Artinya, kenaikan inflasi sebesar 1% akan mempengaruhi HGKP dan HGKG masing-masing sebesar 0,00084% dan 0,04690%.

Pengaruh inflasi terhadap kebijakan HPP tersebut dikarenakan inflasi yang terjadi akan berdampak kepada harga-harga di pasar dan juga kesejahteraan petani. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga masyarakat yang berpendapatan tetap atau rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, inflasi merupakan salah satu indikator dalam penetapan HPP. Hal ini dikarenakan, jika persentase inflasi yang terjadi lebih besar dari persentase HPP, maka kebijakan HPP tidak akan bermanfaat bagi petani.

Selain itu, kebijakan HPP juga secara langsung dan tidak langsung akan memberikan kontribusi terhadap laju inflasi. Secara tidak langsung, adanya kenaikan HPP membuat petani secara psikologis berharap menjual gabah atau beras dengan harga lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pedagang membayar lebih mahal gabah atau beras tersebut sehingga harga jual beras di pasar meningkat dan akan mengakibatkan inflasi.

Kontribusi HPP terhadap inflasi secara langsung dapat dilihat dari hasil perhitungan Bank Indonesia yang menghitung dampak dari kenaikan kebijakan harga terhadap inflasi. Hasil yang didapat adalah jika tarif dasar listrik (TDL) dinaikkan 10 persen maka akan memberi tambahan inflasi sebesar 0,2 persen. Sementara jika harga pembelian pemerintah (HPP) dinaikkan 10 persen maka akan memberi tambahan inflasi sebesar 0,1 persen. Dengan demikian secara tidak langsung kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP), baik untuk gabah maupun beras terbukti dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak hati-hati dan memperhatikan laju inflasi yang sedang terjadi dalam menetapkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) (Antara, 2012).

Harga eceran beras (HEB) mempengaruhi HGKP dan HGKG masing-masing sebesar 0,00448 dan 0,00234. Artinya, kenaikan 1% harga eceran beras (HEB) akan mempengaruhi HGKP dan HGKG masing-masing sebesar 0,00448% dan 0,00234%. Harga pembelian pemerintah baik untuk gabah

kering panen maupun gabah kering giling (HGKP dan HGKG) akan menyebabkan harga eceran beras di pasar meningkat. Adanya kenaikan HPP membuat petani berharap dapat menjual gabah atau beras dengan harga lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pedagang membayar lebih mahal gabah atau beras tersebut sehingga harga jual beras dipasaran meningkat. Kenaikan harga beras yang terjadi akan mengakibatkan inflasi. Kenaikan harga beras dan inflasi yang terjadi akan mengakibatkan masalah yang cukup serius dalam perekonomian dalam negeri. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri, sementara harga beras yang tinggi akan mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat.

Dengan demikian dalam melakukan penetapan HPP baik untuk gabah kering panen maupun gabah kering giling pemerintah perlu memperhatikan dampak yang terjadi terhadap harga beras. Meskipun pengaruh tersebut tidak cukup besar, akan tetapi harga beras memiliki cukup andil dalam penetapan HPP. Penetapan HPP yang terlalu tinggi akan berdampak kepada harga eceran beras dan inflasi yang tinggi, dan jika ini terjadi maka akan menimbulkan masalah-masalah yang cukup serius. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak hati-hati dalam menetapkan HPP, ini dikarenakan kebijakan yang ditetapkan akan berdampak luas terhadap perekonomian Indonesia

Analisis Elastisitas Transmisi Harga

Analisis elastisitas transmisi harga bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak perubahan harga suatu barang disatu tingkat pasar terhadap perubahan harga barang itu di tempat/tingkat pasar lainnya (Hasyim, 2012). Analisis elastisitas transmisi harga dimaksudkan untuk mengetahui ketidakefektifan kebijakan HPP.

Harga rata-rata HPP gabah kering panen (HGKP) dan gabah kering giling (HGKG) masing-masing adalah Rp944,846 dan Rp1.262,654 sedangkan harga rata-rata beras eceran adalah Rp2.511,846 (Bulog, 2012). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai E_t antara HGKP dan HEB lebih kecil dari satu, yaitu $E_t = 0,95 < 1$. Hal ini berarti bahwa, perubahan harga eceran beras (HEB) yang terjadi sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (HGKP) sebesar Rp0,95. Nilai E_t antara HGKG dan HEB adalah lebih kecil dari satu, yaitu $E_t = 0,90 < 1$. Hal ini berarti bahwa, perubahan harga eceran beras (HEB) yang terjadi sebesar 1% akan

mengakibatkan perubahan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling (HGKG) sebesar Rp0,90, sehingga sistem pemasaran yang terjadi belum efisien.

Nilai E_t yang kurang dari satu ($E_t < 1$) mengindikasikan bahwa perubahan harga ditingkat konsumen yang terjadi tidak direspon secara baik oleh harga ditingkat produsen, sehingga petani tidak merasakan dampak dari kenaikan harga beras yang terjadi ditingkat konsumen. Sehingga kebijakan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah belum dapat dirasakan oleh petani atau tepatnya belum efektif.

Pada penelitiannya, Arifin *dkk.* (2006), menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang terjadi transmisi yang baik dari beras konsumen ke harga gabah. Transmisi harga dari harga gabah ke beras konsumen lebih cepat terjadi, artinya perubahan harga gabah yang terjadi akan cepat mempengaruhi harga beras di pasaran. Akan tetapi, perubahan harga beras konsumen tidak direspon secara baik oleh harga gabah. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil yang didapat oleh peneliti.

Selain itu, ketidakefektifan kebijakan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dilihat dari *pertama*, kebijakan ini tidak memiliki perspektif petani sebagai produsen yang harus lebih diutamakan. Hal ini terlihat dari poin stabilisasi ekonomi nasional lebih didahulukan dibanding meningkatkan pendapatan petani. Inpres ini tidak jauh berbeda dengan Inpres No. 7 tahun 2009 tentang kebijakan perberasan. Kebijakan ini berdampak kepada harga gabah/beras yang murah dengan alasan melindungi konsumen.

Ke dua, buruknya pengawasan terhadap inpres ini menjadikan petani di daerah yang minim informasi dan buruknya sarana transportasi berdampak pada pembelian gabah/beras di bawah HPP. Hal ini terjadi dikarenakan sistem pembelian Bulog yang tidak langsung ke petani tetapi selama ini Bulog lebih banyak bekerjasama dengan Mitra Bulog. Walaupun bekerja sama dengan Gapoktan pada tahun ini tetapi sangat rendah penyerapannya, dan dari segi harga Gapoktan menjadi rantai baru bagi petani dalam menjual gabah/beras (Kompasiana, 2012). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan HPP tersebut, agar dapat berjalan dengan efektif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kausalitas yang terjadi antara inflasi dan harga eceran beras (HEB) adalah satu arah, yaitu inflasi mempengaruhi HEB. Hubungan kausalitas yang terjadi antara inflasi dan harga pembelian pemerintah (HGKP dan HGKG) juga satu arah, yaitu inflasi mempengaruhi HGKP dan HGKG. Hubungan kausalitas yang terjadi antara harga pembelian pemerintah (HGKP dan HGKG) dan HEB adalah satu arah, yaitu HEB mempengaruhi HGKP dan HGKG. Kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) di Indonesia belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. 2012. "Inflasi Akan Terus Rendah". <http://www.antarane.ws.com/berita/297339/inflasi-akan-terus-rendah>. Diakses tanggal 2 Oktober 2012.
- Arifin B. 2003. *Pembangunan Pertanian*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arifin B, Suparmin, dan Sugiyono. 2006. "Analisis Tataniaga Beras Indonesia". *Jurnal Sosio Ekonomika, Volume 12, No. 2*.
- Badan Urusan Logistik (Bulog). 2012. *Perkembangan Harga Eceran Beras Medium di Indonesia Tahun 1982-2011*. Badan Urusan Logistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Data Inflasi Indonesia Tahun 1982-2011*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Hasyim AI. 2012. *Tataniaga Pertanian*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Juanda B dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. IPB Press. Bogor.
- Kompas. 2011. "Kenaikan HPP Gabah dan Beras Memicu Inflasi". <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2011/01/07/21000872/Kenaikan.HPP.Gabah.dan.Beras.Memicu.Inflasi>. Diakses tanggal 2 Oktober 2012.
- Kompasiana. 2012. "Inefektifitas Inpres Gabah/Beras Tahun 2012". <http://politik.kompasiana.com/2012/05/02/inefektifitas-inpres-gabahberas-tahun-2012-460095.html>. Diakses tanggal 2 Oktober 2012.
- Nugroho PW dan MU Basuki. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000.1-2011.4". *Diponegoro Journal of Economics, Volume 1 No. 1*. Semarang.
- Sekretariat Negara. 2011. "Inflasi dan Kenaikan Harga Beras". http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5171. Diakses tanggal 2 Oktober 2012.
- Widarjono A. 2007. *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Widiarsih D. 2012. "Pengaruh Sektor Komoditi Beras Terhadap Inflasi Bahan Makanan". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun II No. 6*. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Riau. Riau.